

MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSIF- PLURALIS: PENGALAMAN ISLAM

Zuly Qodir

Abstract:

There are different theoretical paradigms within the world of education. Each has its own ideology. In its turn, an ideology determines goal of education and its way of proceedings, curriculum and its educational methodology, quality of the graduates and its alumni. Within a context of sosial and cultural plurality of the Indonesian society, an inclusive and pluralistic paradigm is recommended. Indeed, such paradigm is in line with the teaching of Islam.

Kata-Kata Kunci:

pendidikan, paradigma, ideologi, keberagaman, inklusif-pluralis, apresiatif

1. Pendahuluan

Di dalam dunia pendidikan berkembang banyak paradigma teoritik (ideologi), misalnya, paradigma konstruktivisme, esensialisme dan progresivisme.¹ Ketiga ideologi ini berkembang secara beriringan dan mendapatkan tempat di masyarakat pendidik di dunia. Selain itu juga ada ideologi konservatisme, liberalisme dan kritisisme.² Ideologi konservatisme meliputi fundamentalisme, intelektualisme dan konservatisme itu sendiri. Ideologi liberal terdiri atas liberalisme, liberasionalisme dan anarkhisme.³ Paradigma teoritik (ideologi) mana yang akan dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Pilihan ideologi ini akan menentukan arah penyelenggaraan pendidikan kita.

Dalam tulisan ini akan disampaikan beberapa gagasan berkaitan dengan paradigma teoritik atau ideologi dalam rangka membangun pendidikan yang mengembangkan karakter pribadi yang inklusif-pluralis. Pertama-tama akan diuraikan pemikiran tentang pilihan paradigma. Kedua, akan dipaparkan gagasan tentang pilihan paradigma inklusif-pluralis. Ketiga akan disampaikan uraian mengenai pengalaman islam dalam pendidikan inklusif-pluralis. Keempat, akan disajikan pengalaman tentang praktik pendidikan inklusif-pluralis. Kelima, akan diuraikan hal-hal yang perlu diperhatikan di masa mendatang untuk mengem-

bangkan pendidikan yang inklusif-pluralis. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan disajikan beberapa catatan penutup.

2. Pilihan Paradigma

Pilihan paradigma teoritik atau ideologi sangat penting artinya bagi penyelenggaraan pendidikan. Hal itu akan menjadi penuntun di masa sekarang dan mendatang terhadap pilihan kerangka konseptual sebuah penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia, dulu kita telah mengenal ideologi tunggal yakni Pancasila. Pada masa sekarang berkembanglah ideologi lain yakni "agama". Di samping partai politik, agama sering dibicarakan secara luas dan menjadi ideologi yang dipilih para penyelenggara pendidikan. Dalam agama ada paham absolute, relatif dan inklusif-pluralis.

Absolutisme mengembangkan perspektif yang secara konseptual menolak keberadaan yang lain, karena apa yang ada di luar keyakinan dirinya dianggap salah. Absolutisme diperkuat oleh perspektif tentang kebenaran tunggal. Kebenaran hanya ada dalam kelompoknya, sementara kelompok lain adalah salah dan karenanya harus ditolak bahkan dipertobatkan.

Relativisme memiliki perspektif kebenaran bahwa apapun yang dirumuskan oleh seseorang atau kelompok hanyalah kebenaran yang relatif atau sementara. Konsekuensinya, kaum relativis meyakini bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Dalam konteks ini muncullah paham relativisme absolut sebagaimana diperkenalkan oleh Seyed Hosen Nashir.

Paham pluralis-inklusif memiliki perspektif sendiri tentang pendidikan. Perspektif pluralis-inklusif menyatakan bahwa kehidupan kita diwarnai oleh beragam tradisi keagamaan, pemikiran, filsafat, dll. Penganut paham ini berpendapat bahwa perspektif yang seharusnya dikembangkan adalah mengakui dan menghargai adanya keragaman kehidupan. Keyakinan akan pluralisme harus dijadikan pandangan hidup bagi umat manusia yang beragam agama, tradisi, filsafat dan seterusnya. Pluralisme sendiri sesungguhnya tidak bertujuan melakukan penyatuan dan inkulturasi agama-agama, tetapi sebuah cara hidup beragama yang secara aktif berani mengakui bahwa agama-agama memiliki kebenaran. Pengakuan terhadap adanya kebenaran pada agama lain bukan berarti tanpa kita harus merasuk agama yang lain, di luar agama kita. Pengakuan ini menjadikan kita menganut agama kita dengan perspektif yang baru, yakni dengan wawasan yang baru, pengalaman yang baru dan perspektif teologis yang baru pula⁴.

Perspektif teologi pluralis inilah yang oleh para penggagas dan penganutnya dianggap sebagai sebuah perspektif teologis yang lebih toleran dan

memanusiakan seluruh umat Tuhan. Perspektif teologis ini sesuai dengan pandangan kitab suci agama-agama, termasuk Al-Qur'an yang menyatakan bahwa karena umat Tuhan berasal dari umat yang satu dan agar saling kenal mengenal, saling tolong menolong, dan semua diberi berkah, maka Tuhan sendiri secara otomatis mengakui pluralisme. Pluralisme adalah bentuk kelembagaan, yang merupakan penerimaan atas beragamnya masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Makna pluralisme lebih dari sekedar toleransi moral, atau koeksistensi moral tetapi sebuah sikap hidup yang proaktif-proeksistensi.

Di kalangan muslim, pandangan teologi pluralis seperti itu sangat kuat dikemukakan oleh tokoh-tokoh intelektual semacam Mohamed Fathi Osman, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Abdul Aziz Sachedina, dll. Sebetulnya pandangan teologi pluralisme bukan sesuatu yang baru sama sekali, sekalipun di kalangan Islam baru berkembang kira-kira tahun 1980-an, bahkan lebih kebelakang lagi yakni tahun 1990-an. Pandangan seperti itu juga masih menyisakan kecurigaan yang hebat di kalangan umat, sehingga perspektif teologi kita cenderung berstandar ganda, yakni jika untuk agama kita dianggap paling sempurna, benar dan lengkap, tetapi untuk agama lain tidak seperti agama kita. Perspektif teologi semacam inilah yang berkembang sampai sekarang, sekalipun telah mulai ada perubahan penting dalam masing-masing penganut agama.⁵

Suatu ideologi tidak mutlak bisa kita anut apa adanya, secara *given*, sebab ideologi yang berkembang di dunia, bila tidak dari tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, akan mengalami beberapa kekurangan, misalnya tidak sesuai dengan konteks sosial di mana kita berada. Namun begitu, ideologi telah memberikan cara pandang masyarakat, termasuk para penyelenggara pendidikan di Indonesia sehingga kita mengenal beragam ideologi yang menjadi pilihan dalam pendidikan.

Paradigma ideologi yang mendasari penyelenggara pendidikan akan menentukan ke mana pendidikan akan dikerjakan. Ideologi tersebut sekaligus akan menempatkan posisi pendidikan kita berdiri, apakah pada ujung ekstrem fundamentalis-rasional ataukah pada titik pertengahan yakni berada di antara liberal dan konservatisme. Pilihan ideologi akan membantu para penyelenggara pendidikan yang akan melakukan reformasi terus-menerus tentang penyelenggaraan pendidikan di nusantara.

Itulah letak pentingnya pilihan ideologi pendidikan yang hendak dijadikan landasan. Mengingat bangsa ini merupakan bangsa yang secara agama, etnis, suku dan gender beragam, akan sangat mungkin pilihan ideologinya berbeda dengan negara yang secara populasi demografik relatif homogen.

Pilihan paradigma ideologi dalam penyelenggaraan pendidikan juga akan berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan. *Pertama, untuk siapa* atau *kelompok sasaran yang mana* pendidikan tersebut diselenggarakan? Pilihan paradigma akan membawa banyak konsekuensi tatkala hal itu ditentukan oleh sebuah instrumen politik tertentu. *Kedua*, pendidikan tersebut untuk apa atau mengarah ke mana? Arah atau visi pendidikan itu akan menentukan isi kurikulum dan materi yang akan diajarkan. *Ketiga*, bagaimana pelaksanaan pendidikan akan dikerjakan? Persoalan ketiga ini menyangkut pola organisasi, pilihan bentuk pedagogi dan instrumen-instrumen lain yang terkait dengan pelaksanaan proses pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana peran serta masyarakat di luar penyelenggara pendidikan dalam bangunan pendidikan yang hendak dikerjakan.

3. Pilihan Paradigma Inklusif-Pluralis

Ketika kita membahas pendidikan inklusif-pluralis di tingkat SMP dan SMA, ada sesuatu yang sangat mengerikan. Sejauh yang saya ketahui, pendidikan agama di tingkat SMP dan SMA cenderung mengarah pada adanya penguatan-penguatan ideologis dan keagamaan sehingga tidak jarang menghasilkan lulusan-lulusan SMP dan SMA yang sektarian. Menurut saya, hal ini merupakan problem besar dalam dunia pendidikan agama pada tingkat SMP-SMA di Indonesia.

Kita mencoba membahas pilihan pelayanan pendidikan yang inklusif bagi para peserta didik (siswa) menengah (SMP dan SMA). Pilihan paradigma ideologi penting supaya tujuan dan misi pendidikan dapat terlaksana dengan mendekati sempurna atau sekurang-kurangnya sesuai dengan kehendak para penyelenggara pendidikan berbasis inklusif. Berkaitan dengan pendidikan agama Islam, kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan paradigma ideologi sebab jika kita *sembrono* dalam memilihnya bisa menghasilkan siswa atau peserta didik yang justru tidak bersikap inklusif melainkan berada pada ujung ekstrem lainnya, entah itu ekstrem kanan (sebagai kaum fundamentalis-radikal) atau ekstrem kiri sebagai kaum liberal-marxian. Kalau akhirnya yang terjadi justru lahirnya para peserta didik yang bersifat ekstrem, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan mereka karena hal itu merupakan konsekuensi dari pilihan paradigma ideologi dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara pendidikan.

Sebagai Negara pluralis, Indonesia tidak mungkin menolak adanya realitas multireligius, multietnik dan multikultur. Keragaman (heterogenitas bangsa) ini bisa dijelaskan dengan satu istilah, yaitu pluralisme.⁶ Pluralisme adalah sebuah kosa kata modern yang sejatinya mengharuskan adanya penghormatan atas

keragaman agama, kultur, etnis, suku, budaya, jenis kelamin, kemampuan IQ, dan seterusnya. Tidak menghargai realitas keragaman berarti membunuh karakteristik bangsa ini yang telah bersama-sama kita perjuangkan untuk merdeka. Kita sudah merdeka dari perang fisik namun seringkali kita belum merdeka secara akal dan nurani sehingga tidak menciptakan suasana pikiran dan batin yang mampu membimbing manusia-manusia Indonesia untuk memikirkan masa depan bangsanya.

Pendidikan kita yang telah berjalan di tingkat dasar dan menengah, tentu saja masih memiliki banyak kelemahan. Namun kita harus mengakui juga bahwa pendidikan kita telah memberikan manfaat, walaupun sedikit. Selama bertahun-tahun, pilihan ideologi pendidikan sebetulnya jelas yakni Pancasila, namun substansinya tidak jelas karena Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila versi yang sedang berkuasa, bukan Pancasila versi sebagaimana para *founding fathers* inginkan. Oleh karenanya pendidikan kita selama bertahun-tahun tidak mampu menciptakan manusia-manusia yang bisa menghargai dan menghormati keragaman agama, etnis, kultur dan jenis kelamin bahkan kemampuan intelektual dan emosional. Pendidikan kita cenderung bersifat doktriner, (baca: indoktrinasi, seperti penyuluhan). Pendidikan kita tidak memberikan alternatif cara pandang dan kurang mendorong daya kreatif peserta didik. Pendidikan lebih menekankan hafalan kognitif dan kurang memberi tempat pada dimensi afektif dan psikomotorik.

Menyadari adanya kelemahan di atas, gagasan adanya pelayanan pendidikan agama Islam yang inklusif (terbuka) pada peserta didik merupakan sebuah gagasan yang harus kita sambut gembira. Kita perlu mendorong agar gagasan ini tidak hanya berhenti sebatas kebijakan yang tidak jelas rimbanya, alias "*sekedar menghabiskan anggaran*" yang telah disetujui oleh pemerintah. Kebijakan adanya gagasan pelayanan pendidikan agama yang inklusif sudah seharusnya menjadi titik berangkat para penyelenggara pendidikan agama di negeri ini agar berpikir kembali secara serius untuk menjadikan pelayanan pendidikan agama sungguh-sungguh bisa menciptakan manusia-manusia Indonesia yang tidak kerdil dalam beragama, berpikir dan bermasyarakat.

Bisakah pendidikan agama yang diselenggarakan bukan saja bersifat inklusif, tetapi sekaligus memberikan ruang yang memadai agar masing-masing peserta didik mampu mengekspresikan diri sehingga nantinya mereka mampu menjadi pemimpin bangsa yang bersifat menghargai perbedaan pandangan, menghormati perbedaan, dan bervisi kebangsaan? Di sinilah tantangan bagi penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan paradigma ideologinya di tengah derasnya ideologi-ideologi lain yang secara bersama-sama menawarkan janjinya masing-masing.

4. Pengalaman Islam dalam Pendidikan Inklusif-Pluralis

Selama kurang lebih satu setengah tahun, saya bersama teman-teman muda Muhammadiyah melakukan pendampingan terhadap sekolah menengah pertama dan atas (SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah) di Gunungkidul tentang pembelajaran Islam di sekolah Muhammadiyah. Awalnya kami mendapatkan tantangan luar biasa hebat, sebab tidak disangka sebelumnya jika kecurigaan di antara umat Islam (khususnya Muhammadiyah) demikian kuat. Sikap saling curiga pada komunitas lain yang sama-sama Islam demikian hebat, sehingga membuat jarak yang cukup keras di antara umat Islam sendiri. Namun dalam perjalanannya, setelah kita bertemu, bertegur sapa, saling diskusi, dan bertukar pengamalan, kecurigaan tersebut semakin hilang bahkan yang terjadi adalah adanya dukungan dari para guru Al Islam di SMP dan SMA Muhammadiyah atas apa yang kami kerjakan. Para guru siap mendukung apa yang kami kerjakan, sekalipun mereka awalnya sangat curiga dan bahkan ketakutan pada pimpinan. Mereka curiga terhadap kami karena kami memasuki wilayah yang menurut mereka sangat penting, yakni Pendidikan Islam khususnya etika (akhlak) siswa dan gurunya.

Yang kami lakukan terkait pendidikan Islam yang inklusif. Kami senantiasa berkomunikasi dengan sederhana dan menggunakan bahasa yang lazim mereka gunakan untuk menjelaskan realitas keragaman dan keterbukaan dalam Islam, dan dalam pengalaman di agama lain. Sebenarnya para guru sudah meyakini adanya ajaran tentang keterbukaan, menghargai orang lain dan toleran pada orang lain, tetapi susah untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada para murid.

Dalam Islam sebenarnya gagasan tentang perspektif inklusif-pluralis terdapat dalam banyak dalil, baik al-quran maupun as sunah. Hanya saja implementasi dari dalil tersebut agak terlambat, atau bahkan kurang mendapatkan tempat yang layak. Hal ini disebabkan oleh paradigma teologi yang masih dominan berkembang dalam masyarakat Islam adalah teologi yang eksklusif, bukan teologi inklusif-pluralis. Selain juga perspektif teologi yang berkembang adalah perspektif teologi *mina wa minkum*, "kami dan mereka", sehingga berkembang agak pesat paradigma "golongan kami" adalah yang beragama Islam secara *leterlijk*, bukan secara semantik ataupun substansif. Sedangkan "mereka yang bukan golongan kami" adalah mereka yang tidak secara eksplisit disebut sebagai penganut Islam.

Kita perhatikan misalnya dalil kitab suci al-quran yang menyebutkan "Kami telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, adalah tidak ada lain kecuali untuk saling kenal mengenal" adalah salah satu ayat yang bisa menjadi basis pengembangan perspektif

teologi yang inklusif-pluralis. Namun, dalam realitasnya, persoalan suku, golongan, bangsa, keturunan, dan jenis kelamin yang bersifat biologis maupun sosiologis seringkali menjadi masalah serius di dalam pergaulan masyarakat.

Belum lagi kita diperhadapkan dengan model-model penyebaran agama (khususnya agama-agama Ibrahim: Yahudi, Kristen dan Islam) yang dalam sejarahnya pernah terlibat permusuhan dan peperangan akbar dengan menewaskan banyak umat manusia tak berdosa. Klaim tentang agama misi atau agama dakwah ternyata menjadi salah satu persoalan lain yang sama seriusnya dengan pengembangan perspektif teologi inklusif-pluralis dalam dunia pendidikan Islam.

Dalil lainnya yang sebenarnya bisa menjadi dasar teologis pengembangan pendidikan inklusif-pluralis di masyarakat (sekolah-sekolah) adalah: "Tuhan telah menciptakan tujuh kelompok manusia di muka bumi, dan dari ketujuh kelompok manusia ini masing-masing mendapatkan sumber mata air (sumber penghidupan), dan di antara kamu janganlah berpecah belah dan saling bermusuhan". Dalil ini sesungguhnya bisa dianalogkan bahwa umat manusia itu akan mendapatkan keselamatannya masing-masing tanpa harus ada penghakiman atau klaim bahwa kelompoknya yang paling otoritatif untuk mendapatkan keselamatan dan penghargaan yang paling tinggi.

Dalam dalil yang lain disebutkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling takut pada Tuhan, bukan takut pada sesama manusia, atau menuduh manusia lain sesat. Dalil yang paling sering dikutip almarhum Cak Nur, "Apakah Yahudi, Nasrani, atau Majusi, asalkan mereka beriman dan berbuat kebajikan, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka akan keselamatannya". Dalil lainnya yang bisa dijadikan dasar basis teologi inklusif-pluralis misalnya: "belumah seseorang dipandang sempurna imannya, tatkala saudara-saudaranya (tetangganya) tidak bisa merasa aman dari gangguan tangannya". Dalil-dalil tersebut memperkuat perspektif teologi inklusif-pluralis yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah berbasis keagamaan, Islam khususnya, dan juga pendidikan Kristen, Katolik atau yang lainnya.

Praktek pendidikan sesungguhnya lebih baik tatkala tidak terlampau banyak mendapatkan campur tangan negara dalam hal pengelolannya, maupun substansinya. Negara lebih baik melakukan kontrol atas kualitas atau mutu dari sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan pada masyarakat dalam kaitannya dengan proses pencerdasan bangsa dan penyadaran masyarakat.

Salah satu materi pelajaran yang bisa dikatakan sebagai bagian integral dari proses ideologisasi peserta didik di sekolah-sekolah Islam, seperti Madrasah Tsanawiyah, Aliyah, maupun Muhammadiyah adalah materi pelajaran Akidah-Akhlak. Materi pelajaran ini dianggap sebagai pelajaran yang sarat dengan muatan ideologis, sebab di sana para siswa akan banyak diperhadapkan dengan masalah-masalah yang terkait dengan apa yang disebut dengan "keimanan" dan akhlak kaum beriman. Sepanjang pengalaman saya mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah Islam, pelajaran akidah akhlak yang merupakan proses ideologisasi pada peserta didik sangat tergantung pada siapa guru/pendidik yang memberikan materi pelajaran ini. Jika pendidik cenderung memiliki perspektif konservatif-eksklusif, maka yang akan banyak diajarkan adalah bagaimana orang Islam tidak usah banyak berbasa-basi, tenggang rasa, toleran, dan apresiatif apalagi empati pada orang yang bukan muslim. Dalil yang dijadikan landasan adalah sebuah dalil kitab suci yang diartikan agak *leterlijk*. Demikian bunyi dalil tersebut "Orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan puas sebelum kamu mengikuti golongan mereka". Dalil ini diartikan, bahwa orang Yahudi dan Kristen yang memang serumpun dengan agama Ibrahim akan selalu menghendaki agar orang Islam menjadi Kristen atau Yahudi, bahkan yang juga sama-sama mengerikannya adalah bahwa orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) dianggap tidak pernah jujur dan tulus dalam berbuat untuk orang lain yang bukan Yahudi dan atau Kristen.

Proses ideologisasi seperti itu bukanlah sesuatu yang menggembirakan bagi kaum beriman yang hendak mengembangkan perspektif teologi inklusif-pluralis. Penghalangnya sangat jelas karena sejak usia pendidikan menengah, bahkan sejak Taman Bermain atau Taman Kanak-Kanak, peserta didik sudah sering mengalami proses indoktrinasi teologi eksklusif. Argumen yang sering digunakan: apa salahnya, *toh, hal itu dilakukan di sekolahnya sendiri yang memang Yayasan Islam atau berlabel Islam*. Sikap para pendidik yang seperti itu menunjukkan bahwa mereka mengabaikan apa yang disebut masyarakat umum, dimana masyarakat umum tidak semuanya beragama Islam. Atau pun jika semua komunitasnya beragama Islam, kita perlu menyadari bahwa Islam juga tidak satu paham atau satu mazhab. Ada banyak mazhab dalam Islam dan semuanya ada pengikutnya. Semua mazhab itu berbaur dalam masyarakat yang bernama Indonesia.

Oleh sebab itu, saya berpikir pendidikan yang inklusif-pluralis memang harus dirumuskan secara serius sejak tingkat taman bermain, atau TK sampai dengan tingkat SMA. Sementara pada tingkat perguruan tinggi, mahasiswa sudah bisa dibebaskan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan kesadarannya. Menurut hemat saya, pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMA harus digagas secara inklusif-pluralis sehingga di kelak kemudian hari bangsa

ini tidak menjadi bangsa yang serba memandang hitam putih atas orang lain, dan bermental kerdil atas perbedaan.

5. Praktek Pendidikan Inklusif-Pluralis

Setelah menentukan paradigma ideologi yang hendak dijadikan pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan belajar mengajar dan pelayanan pendidikan agama yang inklusif, menurut saya praktek pelayanan pendidikan agama perlu dilaksanakan sebagai berikut:

5.1. Visi Pendidikan

Visi pendidikan kita harus dibawa pada bagaimana menumbuhkan lingkungan yang kondusif sehingga mampu menghasilkan praktek pendidikan yang menyenangkan pada siswa (peserta didik) yang nantinya akan mampu membangun masa depan bangsa dengan akal sehat, tidak korup, manipulatif, mampu mempersiapkan siswa menghadapi masa depan dengan secara bersama-sama yang berbeda-beda baik agama, etnis, suku, jender dan kelas sosial.

5.2. Misi Pendidikan

Misi pendidikan kita harusnya mampu mendidik peserta didik yang bisa hidup mandiri dan bersama-sama secara sosial, sebab mereka akan hidup di tengah masyarakat yang beragam. Di samping itu, pendidikan kita seharusnya mampu mendidik peserta didik yang memiliki peradaban mulia seperti menghormati, saling membantu-menolong sesama, manusia mandiri, mendorong berkembangnya kreativitas, tumbuh dan berkembangnya rasionalitas dan hati nurani dan sikap cerdas secara emosional (baca: mampu mengendalikan sikap emosional).

5.3. Suasana

Pendidikan dilaksanakan dengan penuh perasaan kasih sayang, cinta dan tidak normatif. Pelaksanaan pendidikan yang demikian akan sangat bermakna bagi siswa yang sedang dalam kondisi "pencarian" atas makna-makna hidup. Oleh sebab itu, apabila dalam penyampaian pendidikan agama lebih ditekankan pada hal-hal yang sifatnya menakutkan, hukuman, dan kekerasan, peserta didik akan mendapatkan gambar bahwa agama sebenarnya tidak sebaik yang mereka bayangkan yakni memiliki nilai kemanusiaan, cinta, dan kasih sayang antar sesama umat manusia. Pendidikan yang menekankan dimensi formalitas doktriner sudah seharusnya dikurangi porsinya. Penggelontoran doktrin-doktrin agama pada peserta didik, apalagi jika hal itu tidak disertai dengan penjelasan

yang memadai, justru akan mengembangkan cara pandang dan sikap sebagai mana tergambar dalam penjabaran doktrin tersebut.

Setiap doktrin tentu mempunyai pengikut, tetapi kita juga harus memahami dan ketahui bahwa kita hidup di negeri yang agamanya beragam, bukan hanya satu agama. Memang cara pandang *mainstream* akan berpengaruh terhadap pola pendidikan. Namun, bukan berarti kita tidak mungkin memberikan alternatif cara pandang dalam pelayanan pendidikan agama pada peserta didik. Dalam Islam, misalnya, harus dilakukan pemahaman ulang atas doktrin-doktrin dari Al-Qur'an dan hadits tentang jihad, ahlul kitab, dhu'afa, fakir dan miskin, dan seterusnya untuk menemukan makna-makna baru dalam konteks *kunci-kunci hermeneutik yang kritis* dengan bantuan ilmu-ilmu sosial kritis dan ilmu humaniora lainnya, di samping filsafat dan kalam.

5.4. Kehadiran Beragam Pendidik

Pelayanan pendidikan agama yang inklusif dapat pula dilaksanakan dengan menghadirkan pendidik yang beragam pada sekolah-sekolah yang memiliki ciri khusus keagamaan, seperti sekolah Muhammadiyah, sekolah Katolik, sekolah Kristen. Tentu ini sulit, tetapi jika ada niat baik dari kita semua untuk menciptakan pemahaman yang setara antar umat beragama, pendidikan agama akan lebih baik kalau disampaikan oleh guru agama yang beragama sama dengan siswa-siswinya.

Tentu saja perlu dipilih pendidik yang dewasa, bukan pendidik yang memiliki cara pandang dan sikap inferior atas agamanya atau agama lainnya. Mestinya mereka juga bukan pendidik yang merasa agamanya superior dan menganggap agama lain inferior. Pendidik yang dimaksud adalah orang yang memiliki cara pandang setara dalam melihat agama-agama. Untuk mendukung hal ini, seorang guru agama Islam bisa dihadirkan di sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Sebaliknya seorang guru agama Kristen-Katolik dihadirkan di sekolah Muhammadiyah, NU dan Islam lainnya.

5.5. Kisah-kisah tentang Figur-figur Teladan

Memperbanyak kisah-kisah *salafushalih* (kisah-kisah lama yang penuh dengan keteladanan) sangat membantu dalam pembentukan akhlak. Kita bisa menampilkan kisah para nabi yang bersedia bekerjasama dengan sesama umat beragama tanpa melihat agamanya, kisah Para sahabat nabi yang bersedia diundang dalam perjamuan makan oleh seorang pendeta, kisah para ustadz yang bersedia berdialog berjam-jam dengan pendeta di masjid, sahabat Nabi yang bersedia menolong sesama umat beragama, kisah sahabat yang menyediakan tempat ibadah bagi umat Kristiani, kisah tentang sahabat yang tetap berlaku

adil dalam memberikan peradilan pada umatnya sekalipun sebagai seorang Islam atas pencuriannya pada orang beragama Kristen. Berkaitan dengan ini bisa diangkat pula kisah Shahabat Umar bin Khatab yang menyediakan sebagian masjidnya untuk beribadah kaum Kristen tatkala pada hari Minggu. Dan masih banyak kisah-kisah keteladanan yang lain. Kisah-kisah yang bagus ini bisa untuk menumbuhkan sikap dan cara pandang para tokoh teladan dalam sikap dan kesediaan bekerjasama, menghargai serta apresiatif atas agama orang lain yang berbeda.

5.6. Melihat Kondisi Riil Kehidupan Masyarakat

Peserta didik dibawa langsung untuk melihat peristiwa atau kondisi riil masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, misalnya, masyarakat miskin di pinggir sungai Ciliwung, Kali Code, Muara Angke, Sungai Gajah Wong, masyarakat yang ada di panti asuhan, panti jompo, dan seterusnya. Dulu, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah melakukan cara ini untuk mendidik santri-santrinya tatkala mengajarkan surat al-Maun, sehingga pada saat diprotes santrinya atas pengajaran yang diberikan, suatu ketika dibawalah mereka ke daerah miskin di sekitar mereka. Praktek langsung pemberian santunan kemanusiaan misalnya, harus dikerjakan tanpa membawa "baju agama", sekalipun itu berasal dari sekolah yang berbasiskan agama tertentu, seperti Islam atau Kristen.

Pendidikan agama Islam harus didekatkan dengan realitas masyarakatnya bukan berada pada persimpangan yang membingungkan (menguatkan doktrin melemahkan solidaritas sosial). Pendidikan agama harus mampu menyapa masyarakat yang papa dan hina sehingga menumbuhkan sikap dan cara pandang yang manusiawi atas umat manusia, membeda-bedakan agama (baca: memunculkan istilah kita dan mereka) akibat kuatnya formalisasi agama dalam pendidikan agama selama ini. Pendidikan agama yang cenderung formalistis perlu dirombak total sekarang juga.

5.7. Kunjungan Persaudaraan

Pendidikan agama Islam bisa juga dikemas dalam bentuk kunjungan ke tempat-tempat ibadah agama lain. Misalnya, para siswa yang beragama Islam diajak untuk melihat tempat ibadah agama Kristen, masuk ke gereja, dan berdialog tentang apa itu gereja, apa itu Kristen dan seterusnya. Tujuan dari dialog bukan untuk mencari-cari kekurangan, apalagi mencaci agama yang di kunjungi, melainkan menumbuhkan rasa dan sikap mengapresiasi dan menghargai adanya umat lain di sekitar kita. Kunjungan persaudaraan dimaksudkan agar terjadi pemahaman yang memadai tentang *liyan* (orang lain) yang memang riil adanya. Dengan kunjungan persaudaraan diharapkan tumbuh sikap

menghargai, menghormati dan empati antar sesama pengikut Tuhan yang maha kasih sayang, misalnya pada saat pelajaran tentang Kristen, siswa-siswa diajak ke gereja, bertemu seorang pastor atau pendeta, kemudian berbincang tentang Kristen dan gereja sereta jemaah. Pada saat mempelajari materi Islam di sekolah Kristen, siswa dibawa ke pesantren atau masjid, lalu berbincang tentang Islam, masjid, pesantren dan seterusnya.

5.8. Menumbuhkan Kecerdasan Emosional

Sikap dan cara yang inklusif dalam pendidikan agama Islam sebagaimana telah disebutkan di atas akan menumbuhkan sikap dan kecerdasan emosional pada peserta didik. Maka, hal-hal di atas perlu dikerjakan dan diperluas jangkauannya. Pada hemat saya, peserta didik memiliki kecerdasan emosional jika mereka memiliki karatektistik sebagai berikut:

- a. Tidak memandang agama-agama yang berbeda secara negatif dengan melihat kekurangan-kekurangannya, melainkan dengan cara pandang yang setara dan positif; apresiatif-respektif. Ada banyak contoh yang tidak sehat sering kita jumpai tatkala terjadi perpindahan agama yang dilakukan oleh seseorang, berperilaku menjelekkkan agama yang lama dan memuji-muji agamanya yang baru saja dianut. Perilaku semacam ini sudah seharusnya tidak terjadi dalam konteks pendidikan pluralis-inklusif.
- b. Bersedia melakukan perbuatan baik kepada orang lain tanpa melihat apa agama orang lain tersebut. Misalnya, menolong orang yang kecelakaan di jalan dan seterusnya tanpa memandang apapun agamanya.
- c. Tidak memandang agamanya sebagai yang superior di hadapan agama lain atau sebaliknya, tidak merasa inferior di hadapan agama yang berbeda. Dengan memandang agama sendiri secara superior, orang akan memandang agama orang lain sebagai yang salah, kurang dan bahkan sesat. Bila orang menghayati agamanya sendiri secara inferior, orang akan melihat agama orang lain sebagai "penjajah" yang akan menghabisi dan mencengkeram agamanya yang dianut selama ini, sehingga ia akan melakukan perlawanan.
- d. Berani mengoreksi dan kritis atas keimanannya setiap saat, mengakui kebaikan dan kebenaran yang diyakini oleh agama lain, sekalipun tidak harus bertindak mengikuti apa yang diperintahkan atau diritualkan oleh agama lain yang bukan agamanya. Bersikap korektif dan kritis atas keimanannya merupakan perbaikan keimanan setiap saat, sebab dalam Islam dinyatakan bahwa keimanan seseorang kadang berada di puncak, namun kadang berada di bawah. Contohnya, seseorang yang berbuat

curang dan jahil merupakan bukti bahwa keimamannya rendah. Karena-nya, *istigfar* (memohon ampun pada Tuhan) atas kekhilafannya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya kembali merupakan wujud sikap kritis dan korektif terhadap atas keimannya. Berani melakukan koreksi atas keimanan dirinya merupakan bentuk konkret mempertanyakan kembali pada dirinya sendiri, apakah kehidupan keberagamaannya sudah bermanfaat bagi masyarakat.

6. Hal yang Mungkin Dikerjakan

Untuk mengembangkan dan mempraktikkan ideologi inklusif-pluralis dalam pendidikan agama, ada beberapa hal yang bisa dikerjakan:

- a. Tukar menukar guru agama agar bisa saling sharing pengalaman dalam melakukan praktek pendidikan agama, sehingga mungkin nanti akan ada pendidik guru-guru agama di setiap kabupaten atau provinsi.
- b. Ada pendidikan khusus, atau pelatihan khusus untuk guru-guru tentang materi pendidikan yang berbasis pada inklusivitas. Untuk itu, pemerintah atau penyelenggara pendidikan harus berani melakukan kerja ekstra dan menyediakan dana ekstra untuk mempersiapkan guru-guru agama yang memiliki cara pandang inklusif atau seperti diinginkan bersama demi kepentingan masa depan bangsa.
- c. Pemerintah, dalam hal ini Dikdasmen, harus berani melakukan perombakan total atas kurikulum pendidikan agama yang sekarang berlangsung, sebab jika kita perhatikan secara seksama kurikulum pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah dasar dan menengah masih terlampau sedikit mengakomodir adanya muatan keragaman (heterogenitas) agama, multikulturalitas dan kesadaran gender. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan agama yang harusnya dikerjakan di masa-masa mendatang adalah kurikulum yang banyak memuat contoh-contoh konkret tentang bagaimana bersikap toleran pada umat beragama yang berbeda, bagaimana menghargai keragaman budaya, menghargai keragaman kemampuan IQ dan bagaimana menghargai perbedaan gender.
- d. Harus ada monitoring atas pelaksanaan pendidikan agama yang berbasis inklusif. Agar monitoring berjalan dengan baik, harus dibuat semacam proyek percontohan atas beberapa sekolah yang mempraktikkan kurikulum pendidikan agama yang sudah disusun secara maksimal dengan muatan inklusivitas. Percontohan itu bisa diambil dari sekolah-sekolah negeri yang memiliki peserta didik dengan keragaman agama, etnis, jenis kelamin dan kemampuan IQ. Namun bisa juga sekolah-

sekolah swasta yang berciri khusus keagamaan dengan bekerja sama dengan yayasan atau penyelenggara sekolah. Dalam ini, diperlukan adanya kerelaan dari pihak sekolah swasta untuk menjadi proyek percontohan pendidikan dengan kurikulum yang telah disusun dengan basis inklusif sebagai muatan materinya.

7. Penutup

Perspektif pendidikan agama Islam yang dikemas seperti di atas, yakni dengan pilihan ideologi yang jelas berpijak pada keragaman yang secara otomatis menjunjung tinggi perbedaan demi meraih kesetaraan dalam beragama, sejatinya menjadikan pendidikan itu sebagai sebuah upaya *training* yang sistematis. Dengan demikian, pendidikan agama bukan dipahami bagaikan seorang opsir penjara yang bertugas mengawasi para siswa dengan sikap dan penampilan yang garang, bengis dan tanpa kompromi, melainkan sebuah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan seperti ini akan mengarahkan peserta didik menjadi orang yang mandiri dalam bersikap, memiliki kepekaan atas realitas sosial dan berani bertindak dengan berdasarkan pada teladan pendidik.

Di atas semua itu, proses pendidikan yang menghargai pluralitas merupakan pendidikan yang sejatinya sangat cocok untuk kehidupan bersama di negeri ini yang sejak awal menempatkan agama sebagai basis moral-etika, bukan sebagai dasar negara seperti di beberapa negara yang menjadikan agama sebagai dasar resmi negara. Para pendiri bangsa ini tidak memilih ideologi agama sebagai landasan formal berbangsa. Hal ini merupakan sebuah pilihan yang bermakna sangat dalam untuk kelangsungan hidup di negara ini. Pilihan atas ideologi negara yang terbuka seperti itu sebenarnya membawa berkah bagi perkembangan perspektif teologi yang hendak menjadi pijakan dalam bernegara dan bermasyarakat. Perspektif teologi yang terbuka sungguh sangat penting bagi kita saat ini di tengah gejolak perlunya syariat agama, atau dalam bahasa lain semakin kuatnya tuntutan sebagian warga untuk menjadikan agama sebagai dasar negara yang diformalkan. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, kuatnya tuntutan untuk menjadikan agama sebagai ideologi digambarkan sebagai gerakan "demam syariat" dan minimnya penguatan Islam yang substansial.⁷

Munculnya generasi baru, yaitu para penganut teologi pluralis dan intelektual muslim seperti Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, M. Amin Abdullah, Abdul Munir Mul Khan, Budi Munawar Rachman, Ulil Abshar Abdalla dan sebagainya akan semakin memperkuat perjuangan umat Islam untuk mengejawantahkan perspektif teologi inklusif-pluralis di Indonesia,

termasuk melalui pendidikan di perguruan tinggi, sekolah-sekolah menengah dan pesantren. Pendekatan yang dipergunakan untuk memahami Islam pada abad pertengahan atau abad ke-7 Masehi tentu harus berbeda dengan abad XX, XXI dan seterusnya. Terjadinya dinamika dan dialektika antara filsafat, teologi dan ilmu-ilmu sosial-humaniora memungkinkan adanya pendekatan integratif-interkonektif, sebagaimana Amin Abdullah gagas dalam memahami agama Islam.⁸

Zuly Qodir

Doktor Sosiologi, lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta; Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; Anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Catatan Akhir

- 1 Bdk. O'Neil, *Major Ideologi on Education in Society*, 76.
- 2 Bdk. Giroux dan Aronowitz, *The Liberal Ideologi on Pedagogy*, 197.
- 3 Bdk. O'Neil, *Major Ideologi on Education in Society*, (1981), 85 dan (2002), 199.
- 4 Bdk. Kommarudin Hidayat, *Membaca Kehendak Tuhan*, 17.
- 5 Bdk. Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, 72.
- 6 Bdk. Sachedina Abdul Aziz, *Beda Tapi Setara*, 35.
- 7 Bdk. M. Syafii Anwar, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, 23.
- 8 Bdk. M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, 232.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, S.,
2002 *Beda Tapi Setara*, Serambi, Jakarta.
- Amin Abdullah, M.,
2006 *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budhy Munawar Rachman,
2001 *Islam Pluralis*, Paramadina, Jakarta.
- Fathi Osman, Mohamed,
2006 *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, Paramadina, Jakarta.
- Gireux dan Aronowitz,
1980 *The Liberal Ideologi on Pedagogy*, Black Well.
- Komaruddin Hidayat,
2006 *Membaca Kehendak Tuhan*, Teraju, Jakarta.

O,Neil,

1980 *Major Ideologi on Education in Society*, Mac Milan, USA.

Syafii Anwar, M.,

2006 *Islamku, Islam Anda, Islam*, dalam Abdurrahman Wahid, The Wahid Institute, Jakarta.